



Kewirausahaan sanitasi di Indonesia

Nota Kebijakan

Mengimbangi dukungan bagi penciptaan permintaan dengan opsi kebijakan yang memfasilitasi pasokan jamban yang terjangkau dan tahan lama

Usaha kecil kini memainkan peran yang semakin penting dalam penyediaan produk dan jasa air bersih dan sanitasi di Indonesia. Akan tetapi, usaha sanitasi menghadapi berbagai kendala yang muncul dari konteks sektor swasta yang berat, sulitnya akses pembiayaan, marjin keuntungan yang rendah serta kebijakan dan dukungan pemerintah yang bervariasi.

Investasi pemerintah dalam sanitasi perdesaan semakin meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini. Sudah banyak komitmen sumber daya dan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan permintaan di bawah Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Sementara penekanan pada upaya penciptaan permintaan dalam STBM telah membantu menciptakan basis pelanggan bagi usaha dan wirausaha sanitasi, masih banyak upaya yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha yang berketahanan (misalnya kondisi pengampu, dukungan anggaran dan teknis). Tanpa ini, tidak mungkin dapat memastikan bahwa produk-produk yang memadai dan terjangkau tersedia luas, khususnya di lokasi-lokasi terpencil. Karenanya, pemerintah perlu memutuskan bagaimana dan di mana memberi komitmen dana untuk mendapatkan hasil dimaksud, dan kebijakan apa yang akan menggerakkan tanggapan swasta yang inklusif.

Rekomendasi kebijakan 1: Memperkuat pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah tentang kewirausahaan sanitasi dari tingkat nasional

Berbagai upaya sudah berjalan untuk mendorong kontribusi wirausaha dan asosiasi sanitasi, misalnya melalui pengembangan kapasitas Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang sudah terlembaga secara nasional yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, penelitian ini memberi bukti akan perlunya penekanan tambahan serta penguatan pengembangan kapasitas tentang kewirausahaan sanitasi dan pengembangan sisi pasokan dari sanitasi, yang ditujukan secara khusus kepada pemerintah daerah. Temuan penelitian berikut mendukung argumen tentang kebutuhan ini.

Dukungan pemerintah daerah bagi wirausaha dan upaya pelibatan sektor swasta masih terbatas: Pemerintah daerah, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas KUKM, tidak secara proaktif mengupayakan terwujudnya lingkungan pengampu bagi sektor usaha untuk memenuhi permintaan yang diciptakan melalui kegiatan STBM lainnya. Pejabat pemerintah daerah tidak memiliki sikap yang jelas tentang pendekatan yang sesuai dan kuat untuk mendukung wirausaha.

Usaha sanitasi, yang umumnya informal, terbatas aksesnya pada dukungan pemerintah, serta pada pinjaman dan pembiayaan: Para wirausaha umumnya belum memiliki

PESAN-PESAN UTAMA

- Penekanan lebih kuat dan dukungan pengembangan kapasitas dalam STBM tentang kewirausahaan sanitasi dari tingkat pusat.
- Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting untuk menghubungkan permintaan ke pasokan dan memfasilitasi pengembangan pasar. Pemerintah daerah juga dapat melakukan pemantauan, penjaminan mutu, dan memastikan kesamaan hasil.
- Perdesaan terpencil dengan biaya transportasi dan transaksi yang tinggi perlu mendapat perhatian dan strategi khusus untuk memastikan agar tidak ada yang tertinggal.
- Perlu memberikan dukungan untuk mengatasi ketimpangan gender dalam usaha sanitasi dan memfasilitasi wirausaha perempuan.
- Asosiasi wirausaha sanitasi telah menunjukkan nilainya untuk keberhasilan usaha dan hasil sanitasi yang lebih luas, oleh karena itu harus masuk dalam strategi untuk memajukan sektor ini.
- Perlu ada kebijakan yang mendorong lembaga pemerintah daerah yang ditugaskan untuk mendukung pengembangan sektor swasta untuk juga memasukkan sektor sanitasi ke dalam lingkungannya.

modal dan keterampilan manajemen keuangan yang dibutuhkan untuk dapat mendaftarkan usahanya (89% dari 56 usaha sanitasi dan 63% dari 24 usaha penyedot tinja bersifat informal dan tidak terdaftar). Bank-bank besar lebih suka meminjamkan uangnya kepada bisnis terdaftar, dan walaupun bank lokal memiliki syarat peminjaman yang lebih longgar, itu pun harus didasarkan pada bukti adanya arus kas yang baik. Tidak familiarnya bank dan lembaga keuangan mikro dengan sanitasi sebagai bisnis, yang berdampak pada kurangnya minat untuk memberi pinjaman, menciptakan kendala lainnya bagi usaha sanitasi untuk mengakses pembiayaan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi usaha sanitasi mengingat marjin keuntungan mereka yang rendah.

Usaha sanitasi memiliki kebutuhan yang jelas untuk mendapatkan pelatihan dalam manajemen keuangan, perencanaan teknis dan bisnis: Persoalan ini bukan hal yang unik untuk sektor sanitasi saja, melainkan hal yang umum di sektor usaha kecil dan menengah. Pelatihan selama ini diberikan melalui program-program donor internasional. Walau sebagian besar kabupaten sudah memiliki lembaga pendidikan kejuruan yang menawarkan kursus usaha dan manajemen, ini biasanya membutuhkan biaya (yang menjadikannya tidak terjangkau bagi para wirausaha) dan umumnya lebih fokus pada perdagangan daripada sanitasi.

Rekomendasi kebijakan 2: Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pengembangan pasar, melakukan pemantauan dan meregulasi usaha sanitasi, serta memastikan kualitas hasil yang dicapai

Terdapat tiga peran utama bagi pemerintah daerah terkait usaha dan wirausaha sanitasi: (i) Memfasilitasi pengembangan pasar; (ii) Memantau dan meregulasi usaha sanitasi serta kualitas produk dan jasa mereka, dan; (iii) Memastikan adanya hasil yang sama. Secara khusus, hal ini akan melibatkan Dinas Kesehatan, namun Dinas KUKM pun akan perlu dilibatkan (lihat rekomendasi 6 di bawah).

Pemerintah daerah memiliki peran untuk memfasilitasi pengembangan pasar, karena tanpa dukungan seperti ini usaha sanitasi akan sangat sulit terbentuk: Penelitian ini menunjukkan bahwa wirausaha sanitasi umumnya tumbuh di mana mereka mendapatkan dukungan melalui lembaga eksternal dan donor. Usaha sanitasi biasanya memiliki margin keuntungan yang kecil dari penjualan produk dan penyediaan jasa sanitasi. Oleh karena itu, walau menawarkan peluang ekonomi, sektor sanitasi terbukti bukan lah sektor di mana mudah mencapai keberhasilan. Penelitian menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar (77%) dari 56 usaha sanitasi berhasil dan memiliki pemasukan yang stabil, 55% di antaranya pendapatan bulannya di bawah Rp 5 juta. Selain itu, sebagian besar (82%) juga memiliki pekerjaan lain selain sebagai wirausaha sanitasi. Pemerintah daerah yang menjalankan program sanitasi perdesaan (misalnya, memicu permintaan) juga perlu memastikan usaha-usaha tersebut didukung dan ada rantai nilai agar kebutuhan jaman dapat terpenuhi. Dukungan bagi pengembangan pasar dapat berupa pelatihan dalam manajemen keuangan, manajemen usaha serta penjualan dan pemasaran, desain produk berorientasi pengguna, sosialisasi proses pendaftaran dan formalisasi usaha, dan memfasilitasi akses pada pinjaman ringan.

Pemantauan dan penjaminan mutu untuk sektor sanitasi swasta dibutuhkan, sebagaimana untuk sektor lainnya, untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas: Di Jawa Timur, satu asosiasi sanitasi mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kesehatan untuk produk yang terstandarisasi, yang mendukung kualitas produk yang lebih baik melalui penerapan standar minimum. Pemerintah daerah dapat berperan penting untuk mempromosikan standarisasi dan akreditasi wirausaha sanitasi dan produk-produk mereka.

Berkenaan dengan Hak Asasi Manusia untuk Air dan Sanitasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pemerintah daerah memiliki mandat yang penting untuk menjamin bahwa tak seorang pun akan dikecualikan atau tertinggal:

Karena keterjangkauan masih menjadi persoalan di beberapa lokasi, dan studi rantai nilai menunjukkan terjadi peningkatan biaya di daerah terpencil, pemerintah daerah harus memantau *siapa yang mendapat manfaat* dari pengembangan usaha. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi komplementer untuk pengembangan pasar, sesuai kebutuhan dan di mana hal ini dibutuhkan (dibahas lebih lanjut di rekomendasi 3 berikut ini).

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan tahun 2013-2016, dipimpin peneliti dari Institute for Sustainable Futures, UTS, bermitra dengan Plan International Indonesia dan Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Setelah kajian literatur sistematis, tim melakukan kajian tentang insentif yang memengaruhi keterlibatan swasta dalam sektor air bersih dan sanitasi di Indonesia. Kajian ini diikuti dengan kajian yang fokus pada kesenjangan-kesenjangan utama dalam basis bukti: (i) analisis rantai nilai sanitasi di daerah berkepadatan rendah di dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), mencakup 96 desa, dan (ii) penelitian metode campuran tentang motivator, penggerak dan kendala bagi 70 usaha sanitasi yang melibatkan penelitian lapangan di Jawa dan NTT.

Selama tiga tahun penelitian, lebih dari 600 wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah (pada tingkat nasional dan sub-nasional), organisasi masyarakat sipil, donor, swasta dan masyarakat. Hasil penelitian diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Tiga seminar kemudian diselenggarakan untuk memaparkan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan nasional dan provinsi di Indonesia di mana mereka berkesempatan untuk memverifikasi temuan dan mengembangkan strategi ke depan.

Rekomendasi kebijakan 3: Perlu perhatian dan strategi khusus bagi perdesaan untuk mengatasi biaya tinggi

Menggunakan strategi berbasis pasar untuk meningkatkan hasil-hasil sanitasi memiliki risiko bahwa sebagian penduduk akan tereksklusi. Temuan penelitian menunjukkan adanya keperluan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun strategi komplementer yang dapat meningkatkan akses pada produk dan jasa terjangkau di lokasi-lokasi tertentu.

Di daerah terpencil rawan kemiskinan, jamban yang berkualitas biayanya tinggi: Harga jamban bisa sampai 185% lebih tinggi di daerah terpencil daripada di ibukota kabupaten karena biaya transportasi dan harga material lokal yang tidak menentu, seperti pasir dan kerikil. Biaya transportasi sangat bervariasi tergantung lokasi, dan banyak ditemukan monopoli di sektor transportasi. Temuan ini menunjukkan batasan respon berbasis pasar murni dalam memfasilitasi akses pada produk dan jasa sanitasi.

Ada berbagai kemungkinan strategi komplementer, antara lain, dukungan pemerintah bagi rumah tangga miskin (yang diberikan sebagaimana kebijakan perlindungan sosial lainnya); melibatkan wirausaha sanitasi dalam program subsidi pemerintah yang ada sehingga potongan harga tertarget dapat diberikan tanpa mendistorsi pasar ('subsidi pintar'); mekanisme pembiayaan tingkat lokal bagi rumah tangga, seperti dana bergulir dan desain jamban yang tahan lama dan terjangkau menggunakan material lokal. Terdapat juga opsi lainnya, misalnya, mekanisme untuk mendukung pembayaran fleksibel bagi pelanggan, termasuk akses pada kredit bagi usaha sanitasi agar ada arus kas yang memadai. Pemerintah juga dapat mengkaji mekanisme pembiayaan alternatif, termasuk penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan; asosiasi wirausaha dapat membantu mengurangi biaya melalui pembelian dalam jumlah besar, serta pemberian subsidi bagi rumah tangga miskin.

Rekomendasi kebijakan 4: Dukungan tertarget dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan gender di antara wirausaha sanitasi

Di Indonesia, perempuan bergerak aktif di sektor usaha mikro. Namun di sektor sanitasi, sedikit sekali perempuan yang terlihat, sehingga perlu menyusun suatu strategi tertarget untuk memungkinkan perempuan memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan sektor sanitasi yang juga dapat memfasilitasi wirausaha perempuan berinteraksi dengan perempuan lainnya di dalam rumah tangga sebagai jalur menuju keputusan rumah tangga untuk melakukan investasi sanitasi.

Perempuan kurang terwakili di antara para wirausaha sanitasi: Perempuan sangat kurang terwakili dalam sampel penelitian ini (13% perempuan, 87% laki-laki di antara wirausaha sanitasi, dan 4%, 96% laki-laki dalam bisnis penyedotan tinja). Hal ini menengarai adanya kendala bagi wirausaha perempuan untuk mengakses modal dan kurangnya waktu mereka untuk kegiatan ekonomi. Baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil maupun asosiasi sanitasi dapat memainkan peran untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai wirausaha sanitasi melalui kuota dalam program pelatihan yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi wirausaha sanitasi.

Rekomendasi kebijakan 5: Asosiasi wirausaha sanitasi harus masuk dalam strategi untuk memajukan sektor ini karena nilai yang mereka tawarkan sudah terbukti

Asosiasi wirausaha sanitasi telah menunjukkan nilainya bagi keberhasilan usaha dan hasil-hasil sanitasi yang lebih luas, dan karena itu menawarkan jalur berharga untuk mendukung pengembangan usaha sanitasi.

Asosiasi wirausaha sanitasi telah meningkatkan kualitas jasa dan keberhasilan usaha, dan telah menghubungkan para wirausaha sanitasi baik satu sama lainnya maupun dengan pemerintah daerah: Asosiasi-asosiasi ini, termasuk tingkat nasional dan kabupaten, didirikan berbasis keanggotaan dan beroperasi sebagai bentuk kewirausahaan sosial untuk mendukung wirausaha sanitasi. Asosiasi tersebut memberikan akses pada material yang lebih murah, piranti lunak manajemen keuangan, akreditasi produk, dukungan pinjaman konsumen, jejaring dan peluang pembelajaran dan pelatihan antar sesama. Keberhasilan usaha juga meningkat bagi para wirausaha yang menjadi anggota asosiasi (64% dari wirausaha yang juga anggota asosiasi sangat sukses atau sukses). Namun asosiasi-asosiasi ini masih dalam proses menyempurnakan model bisnis dan lingkup jasanya, dan peran mereka yang berharga mungkin masih membutuhkan dukungan eksternal untuk memastikan keberlanjutannya. Selain itu, tingkat paling efektif untuk mendirikan asosiasi – apakah kabupaten, provinsi atau nasional – masih butuh dipertimbangkan lebih lanjut.

Rekomendasi kebijakan 6: Kebijakan harus mendorong lembaga pendukung sektor swasta lokal untuk memasukkan usaha sanitasi ke dalam lingkungannya

Lembaga pemerintah lokal yang ditujukan untuk mendukung pengembangan sektor swasta (misalnya, Dinas KUKM atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian) sangat jarang mememberi dukungan kepada usaha sanitasi. Akan tetapi, keterlibatan mereka amat penting.

Salah satu alasan rendahnya keterlibatan kedua lembaga ini adalah karena sanitasi dianggap bukan peluang bisnis yang menjanjikan, dan dukungan pemerintah umumnya diarahkan pada kegiatan usaha lokal yang jelas-jelas mendukung pembangunan sosio-ekonomi.

Terdapat juga temuan tentang kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan tentang bisnis mana saja yang mendapatkan dukungan. Terakhir, karena pemberian dukungan biasanya didasarkan pada pengakuan hukum, dan karena sebagian besar usaha sanitasi bersifat informal, mereka sering tidak memenuhi syarat untuk menerima dukungan tersebut.

Kepemimpinan dari Bupati dan Pokja Sanitasi untuk menggerakkan lembaga-lembaga pemerintah terkait dapat menjadi satu titik awal untuk mengatasi persoalan ini. Namun, perlu dikembangkan insentif yang jelas untuk memastikan minat dan komitmen, serta akuntabilitas kuat yang diinginkan oleh ketua Pokja Sanitasi – Sekretaris Daerah – untuk memastikan keterlibatan semua pihak terkait. Upaya formalisasi usaha sanitasi juga dapat meningkatkan status mereka untuk dapat memenuhi syarat menerima dukungan dari instansi pendukung pengembangan sektor swasta.

Rujukan lebih lanjut

- Murta, J. dan Willetts, J. (2014) Incentives shaping enterprise engagement in Indonesia, Enterprise in WASH – Working Paper 2a, Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney
- Murta, J., Willetts, J. dan Triwahyudi, W. (2016, in press) Sanitation entrepreneurs in Indonesia, International Water Association, *Journal of Environment, Development and Sustainability*
- Murta, J., Indarti, N., Rostiani, R., dan Willetts, J. (2015) Motivators and barriers for water and sanitation enterprises in Indonesia, Enterprise in WASH - Research Report 3, Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney
- Willetts, J., Susanto, A.A., Sanjaya, M.R., Murta, J. dan Carrard, N. (2015) Sanitation value-chain in Nusa Tenggara Timur Indonesia, Enterprise in WASH – Research Report 1, Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney
- Willetts, J., Susanto, A.A., Sanjaya, M.R., Murta, J. dan Carrard, N. (2015) Sanitation value-chain in Nusa Tenggara Timur Indonesia, Enterprise in WASH – Research Report 1, Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney



Tim peneliti: Profesor Juliet Willetts, Dr Nurul Indarti, Dr Akbar Susanto, Janina Murta, Anna Gero, Ryan Sanjaya, Rokhima Rostiani, Wahyu Triwahyudi, Dina Daulay, dan Naomi Carrard

Dokumen ini adalah keluaran penelitian yang didanai Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Segala pandangan dan opini dalam dokumen ini adalah milik penulis dan belum tentu mencerminkan pandangan DFAT atau Pemerintah Australia.